Bupati Usulkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Ini Tanggapan DPRD Demak

VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - Kesehatan merupakan hak setiap orang. Hak asasi manusia bagi orang bukan perokok atau perokok pasif yaitu hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari bahaya asap rokok.

Berlatar belakang kondisi tersebut, Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE atas nama Pemkab Demak pada 12 September 2023 mengusulkan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Di samping juga menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Sehubungan itu sebelum dilakukan pembahasan DPRD Demak memberikan sejumlah pendapat, melalui pandangan umum fraksi. Seperti disampaikan juru bicara Fraksi PDIP Badarudin pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak, Kamis (14/09/2023).

"Fraksi PDIP pada prinsipnya mendukung diusulkannya Raperda KTR. Bahkan harus dikampanyekan bersama. Jika perlu KTR tidak hanya berlaku di kantor-kantor, tapi di rumah dan mobil seperti kendaraan angkutan umum," ujarnya.

Pendapat sama tentang penggunaan produk perundangan terbaru sebagai konsideran hukum juga disampaikan Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Gabungan Amanat Demokrasi, Fraksi Partai Nasdem, serta Fraksi PKB. Bahwa semua pasal di dalam Raperda KTR hendaknya disesuaikan dengan pasal-pasal dalam UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Namun yang tak kalah penting, saat ini polusi udara yang disebabkan polutan asap rokok sudah di atas ambang batas. Maka disusunnya Raperda KTR tidak bermaksud mendiskriminasikan perokok aktif dan pasif. Namun lebih pada menyadarkan agar asapnya mengganggu perokok pasif, khususnya kesehatan anak-anak dan kaum perempuan," imbuh HS Fahrudin Bisri Slamet, anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua DPRD Demak.

KR - Sari jati

Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak saat menyerahkan pandangan umum atas dua Raperda usulan Bupati Demak, termasuk Raperda tentang KTR.

Sementara menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Hj Hermin Widyawati, perlu penegasan ke setiap pengelola, penyelenggaraan atau penanggung jawab tempat umum untuk menyediakan tempat khusus merokok. Karna kata 'dapat' yang termuat di beberapa pasal dalam Raperda tidak menunjukkan ketegasan. Sehingga berpotensi tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Kholid Muktiyono berpendapat, agar raperda KTR nantinya dapat bermanfaat dan berjalan dengan baik, maka harus ada ketegasan dan keseimbangan aturan mengenai KTR dan Area Smoking atau Tempat Khusus Merokok. "Artinya ketika ditegakkan aturan KTR maka berkewajiban pula menyediakan area bebas merokok," ujarnya.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Gerindra H Marwan menuturkan, dalam ketentuan tentang KTR perlu memperhatikan ketersediaan sarana berupa tempat khusus merokok. Selain itu ditanyakan pula perihal kesiapan pemerintah daerah untuk menyediakan area merokok/tempat merokok dalam hal tersebut, apakah sudah melalui kajian yang mendalam.

Sedangkan berkaitan ketentuan sanksi bagi yang melanggar larangan tempat merokok, disarankan agar menggunakan cara persuasif. Sebab melakukan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar cukup rawan, sepanjang pemahaman atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum menjadi budaya. Sehingga dapat menjadi perselisihan yang dimungkinkan berujung dengan kekerasan.

Sementara tanggapan pamungkas dari Ketua Fraksi Gabungan Amanat Demokrasi H Farondhi terkait DBHCHT. "Ketika Raperda KTR ditetapkan, apakah sudah siap jika besaran DBHCHT berkurang. Mengingat rokok dan tembakau mendatangkan DBHCHT, sementara para perokok merasa dipersempit kebebasan area merokoknya," pungkasnya. * **ssj**

BERTEMU WISATAWAN ASING DI BOROBUDUR

Kabaharkam Ajak Nikmati Kue Tradisional

MAGELANG (KR) - Peserta Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2023, yang semuanya mengenakan blangkon, melakukan kunjungan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) Kabupaten Magelang, Rabu (13/9). Kabaharkam Polri Komjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran MSi bersama Pejabat Utama Polri, beberapa Direktur dari Polda seluruh Indonesia, yaitu Direktur Binmas, Direktur Pam Obvit, Direktur Samapta, dan Direktur Polair seluruh Indonesia, yang juga mengenakan blangkon, juga hadir dalam kegiatan ini.

Kabaharkam Polri juga sempat bertemu dan berdialog dengan 2 wisatawan mancanegara saat berada di Taman Lumbini komplek TWCB. Ini terjadi setelah Kabaharkam Polri melakukan foto bersama dengan peserta Rakernis Baharkam Polri 2023 di lokasi Taman Lumbini TWCB. Dalam pertemuan dengan wisatawan mancanegara tersebut Kabaharkam Polri juga sempat mengajak kedua wisman tersebut untuk menikmati kue tradisional seperti gethuk, kue lapis maupun lainnya.

Rakernis Baharkam Polri Tahun 2023 yang dilaksanakan di Taman Lumbini kawasan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) tersebut memperoleh pengamanan dari Polresta Magelang yang dipimpin Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono SIK SH MH bersama Wakapolresta Magelang AKBP Roman Smaradhana Elhaj SH SIK MH serta para pejabat utama Polresta Magelang. GM TWC Unit Borobudur Jamaludin Mawardi juga memberikan paparan atau presentasi di forum Rakernis ini, yang dilanjutkan presentasi Dirpamobvit Polda Jateng Kombes Pol Prihartono Eling Lelakon.

Kabaharkam Polri mengatakan dalam rangkaian kegiatan Rakernis Baharkam Polri 2023, salah satu program yang ingin kedepankan adalah pengamanan destinasi pariwisata super prioritas. Dalam konteks ini, ingin diperkuat Tourism Police yang berada di destinasi wisata super prioritas tersebut, salah satunya Candi Borobudur.

Oleh karena itu, dalam kunjungan ke TWCB ini juga diserahkan sebuah mobil Command Centre yang berisi kelengkapan-kelengkapan untuk memperkuat pengamanan objek wisata. Ada CCTV Portable sebanyak 10 titik untuk menutup titik yang belum ada CCTV dari pengelola kawasan. Juga segway atau kendaraan listrik beroda dua serta sepeda elektrik untuk patroli. Seluruh destinasi super prioritas dan destinasi wisata prioritas akan diberikan. **(Tha)-f**

KR-Thoha

Kabaharkam Polri saat melakukan pengguntingan untaian bunga melati.

Pertamina Tanam Mangrove dan Bersihkan Pantai

SEMARANG (KR) - Memperingati World Clean Up Day 2023, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), Kamis (14/9) melakukan penanaman bibit mangrove dan kelapa genjah di pesisir Pantai Tirang Semarang. Tak hanya melakukan penanaman pohon, Pertamina mengajak 500 orang terdiri dari manajemen, karyawan serta masyarakat untuk membersihkan Kawasan pesisir pantai dari sampah plastic dan sterofoam.

KR-Chandra AN

Eksekutif GM Regional JBT PT Pertamina Patra Niaga, Aji Anom Purwasakti (tengah) menanam mangrove di pesisir Pantai Tirang Semarang.

Total ada 10.000 bibit mangrove dan 300 kelapa genjah yang ditanam Pertamina bersama Serikat Pekerja (SP) Persada IV, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, komunitas mangrove dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang. Kegiatan kali ini juga dilengkapi dengan aksi bersih-bersih kawasan pantai.

Executive General Manager Regional JBT PT Pertamina Patra Niaga, Aji Anom Purwasakti mengatakan, Pertamina terus berkomitmen dalam melestarikan lingkungan dan mencegahnya dari kerusakan, khususnya di kawasan Pantai Tirang, Kota Semarang. Pantai Tirang menjadi salah satu kawasan yang cukup memprihatinkan karena terjadi abrasi yang membuat daratannya kian berkurang.

"Pantai Tirang jadi perhatian karena jadi pantai yang tengah hits di Semarang, namun terjadi abrasi yang luar biasa, jadi kegiatan ini menjadi salah satu yang menunjukkan komitmen Pertamina dalam rangka melestarikan lingkungan dan mencegah dari kerusakan alam," kata Aji Anom.

Ia mengatakan, Pertamina akan terus menjaga kawasan Pantai Tirang agar abrasi yang terjadi kian berkurang. Pemantauan bibit pohon mangrove akan terus dilakukan agar bisa hidup dengan baik, yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami bekerja sama dengan komunitas untuk terus merawat dan terus dimonitor agar berkembang, karena setelah menanam biasanya menunggu 3 bulan bisa hidup sendiri," jelasnya. **(Cha)-f**

Penataan WGM Diapresiasi Anggota DPR

WONOGIRI (KR) - Proyek revitalisasi kawasan wisata Waduk Gajahmungkur (WGM) Wonogiri Zona 1 direncanakan selesai akhir tahun 2023 ini.

Proyek APBN 2023 senilai Rp 22,8 miliar lebih itu kini selesai 47 persen nantinya diharapkan sebagai penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

"Kami mengapresiasi proyek kebanggaan masyarakat Wonogiri ini, namun yang tidak kalah penting insfratruktur jalan menuju WGM harus diperbaiki karena sudah banyak yang rusak," ungkap Drs Hamid Noor Yasin MM, anggota Komisi V DPR RI di Wonogiri, Rabu (13/9). Diakui pihaknya juga salut atas program Penataan Kawasan Waduk Gajah Mungkur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Sebagai salah satu daerah penyangga KSPN Borobudur, Kabupaten Wonogiri dapat mengembangkan Waduk Gajah Mungkur menjadi kawasan wisata yang memberdayakan ekonomi, menciptakan lapangan kerja sekaligus menjadi ikon kebanggaan daerah. "Apalagi dengan luas daerah genangan lebih dari 8.800 hektare Waduk Gajah Mungkur menjadi salah satu waduk terbesar di Indonesia," kata kader senior PKS asal Wonogiri.

Penataan Kawasan Waduk Gajah Mungkur Zona 1 Tahap 1 sudah mencapai 47 persen, dibangun sejak September 2022 dan ditargetkan selesai pada Desember 2023. Pengembangan Kawasan Waduk Gajah Mungkur sendiri dibagi menjadi tiga zona. Zona 1 dengan luas 10 hektare adalah kawasan wisata dan pusat rekreasi anak dan remaja.

Zona 2 dengan luas 75 hektare direncanakan sebagai area perluasan kawasan wisata berupa lakefront park atau taman tepi danau. Sedangkan Zona 3 dengan luas 162 hektare direncanakan sebagai area pengembangan Watu Cenik Adventure and View dan Bukit Joglo. Hamid berharap agar progres fisik Kawasan Waduk Gajah Mungkur dapat diselesaikan sesuai target pada bulan Desember 2023. FPKS juga mendorong agar keseluruhan sarana pendukung pariwisata bagi Kawasan Waduk Gajah Mungkur ini juga benar-benar disiapkan, termasuk akses jalannya.

Misalkan saat ini masih ada keluhan adanya jalan rusak dari Waduk Gajah Mungkur ke selatan sampai dengan Pracimantoro. Perbaikan yang ada hanya sedikit, itupun berupa tambalan-tambalan. Hamid mengusulkan agar program Inpres Jalan Daerah dari Direktorat Jenderal Bina Marga KemenPUPR dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan-jalan daerah sebagai akses Kawasan Waduk Gajah Mungkur. Apalagi kapasitas fiskal Kabupaten Wonogiri yang berkategori Sangat Rendah memenuhi syarat untuk mendapatkan program Inpres Jalan Daerah tersebut. Dengan lancar dan mantapnya jalan akses ke WGM Wonogiri, program penataan kawasan obwis ini akan benar-benar maksimal mendatangkan banyak wisatawan sehingga perekonomian masyarakat Wonogiri ikut terdongkrak. **(Dsh)-f**

Digelontorkan APBD untuk Bansos Kesehatan

BOYOLALI (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan sosial kesehatan (bansoskes) bagi penduduk kurang mampu melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Boyolali. Bansoskes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 yang termasuk dalam belanja tidak terduga (BTT).

Kepala Dinsos Boyolali,Sumarno mengatakan, total anggaran BTT yang diperuntukkan bagi Bansoskes sebesar Rp 10 miliar. Hingga bulan Juli 2023 ini, Dinsos Kabupaten Boyolali sudah mencairkan anggaran sejumlah Rp 8.616.688.102,- untuk 2.019 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan untuk anggaran pengobatan 565 KPM yang sudah sembuh hingga bulan Agustus 2023 masih dalam proses pengajuan.

Untuk regulasi lama, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), tiap KPM menerima bansoskes sebesar Rp 15 juta untuk berobat di rumah sakit (RS) negeri atau jika diagnosa dokter membutuhkan pengobatan lebih, maka akan dibiayai hingga sembuh dan bisa menelan biaya yang lebih besar dari nominal seharusnya. Sedangkan untuk pengobatan di RS swasta, tiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp 5 juta.

Karena keterbatasan jumlah anggaran dan membludaknya KPM yang membutuhkan, maka dikeluarkanlah regulasi baru dan mulai bulan September ini Dinsos Kabupaten Boyolali akan lebih selektif dalam pemberian bansoskes tersebut agar bantuan lebih merata. Untuk regulasi baru, tiap KPM akan menerima bansoskes sebesar Rp 10 juta saat berobat ke RS negeri, dan Rp 4 juta di RS swasta serta harus masuk data warga miskin di Monitoring Center for Development (MCD) Kabupaten Boyolali. "Yang bersangkutan sakit, ber-KTP Boyolali dan tidak punya BPJS, nanti masuk ke rumah sakit dan bilang pembiayaan ditanggung bansoskes, kemudian data dicek masuk MCD atau tidak, jika masuk MCD maka akan dibiayai pemerintah," terang Sumarno saat ditanya mengenai syarat pengajuan bansoskes,Kamis (14/9). **(Mul)-f**

Pencanangan TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan

SUKOHARJO (KR) - Pencanangan TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 digelar di Lapangan Desa Ngreco Kecamatan Weru, Kamis (14/9). Program Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang disingkat Bangga Kencana merupakan salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu program keluarga berencana dalam membangun keluarga berkualitas adalah upaya pengendalian penduduk dengan cara mengatur jarak kelahiran, melakukan pendewasaan usia perkawinan dan penurunan angka kematian bayi, ibu hamil dan ibu melahirkan.

Program Bangga Kencana berkontribusi bukan hanya membatasi jumlah kelahiran namun meningkatkan kualitas manusia, diantaranya peningkatan gizi ibu dan anak, mutu tenaga kerja, produktivitas, tingkat pendidikan, kesehatan dan penurunan kemiskinan. Program Bangga Kencana ini tentunya selaras dengan Program Kerja Prioritas Pertama Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun yang tetap memegang teguh karakter bangsa. **(Mam)-f**

Mimbar Legislatif

BPR BKK Harus Perhatikan Tingkat Kesehatan Bank

ANGGOTA Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo minta kepada BPR BKK di Jawa Tengah agar benar-benar memperhatikan tingkat kesehatan bank, khususnya yang terkait dengan pinjaman. Hal ini untuk menghindari kredit macet atau NPL yang tinggi. Bambang Eko Purnomo mengatakan hal ini saat melakukan kunjungan kerja di PT. BPR BKK Kabupaten Tegal, pekan lalu. Secara umum, kinerja BPR BKK Kabupaten Tegal sudah cukup baik. Diharapkan dengan kinerja tersebut, masyarakat dapat bekerjasama dengan BPR BKK.

KR-Budiono

Bambang Eko Purnomo

Dengan tingkat kesehatan bank yang bagus, akan semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan BPR BKK untuk melakukan kerjasama, sehingga keberadaan BPR BKK di tengah masyarakat benar-benar bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah be bawah.

Secara prinsip BPR BKK perlu lebih sigap dalam penanganan dan pelayanan nasabah, sehingga masyarakat akan semakin nyaman dalam melakukan kerjasama dengan BPR BKK. Meski demikian, Perbankan milik pemerintah daerah ini harus bersikap hati-hatian. Jangan sampai terjadi kredit macet yang tidak sesuai dengan aturan perbankan.

Anggota Komisi C Dwi Yasmanto menyarankan sikap kehati-hatian itu perlu diperhatikan, mengingat banyak praktik pinjaman online (pinjol) di kalangan masyarakat. Ia menyarankan BPR BKK perlu menggenjot kredit di sektor pertanian untuk membantu masyarakat pedesaan. Komisi C DPRD Jateng menilai Non Performing Loans (NPL/ kredit macet) BPR BKK Kabupaten Tegal sebesar 11 persen tergolong cukup tinggi. Jajaran direksi harus bisa menekan angka NPL serendah mungkin. Angka NPL harusnya pada posisi satu digit. **(*)-f**

(Disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)